

**PERPANJANGAN ALIANSI KEAMANAN  
JEPANG-AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2013  
(PERSPEKTIF JEPANG)**

Elli Listiana

Erna Kurniawati

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 2, Tambakbayan Yogyakarta

Email : ellilistiana@yahoo.com

ernahpw@yahoo.com

**Abstract**

*Japan-United States engaged in alliance security since 1951. In 2013 both countries declared to continue and extend the alliance. This paper analyzes the Japanese interest in the extension of alliance security agreement with United States. Japan-United States made a commitment to continue and extend the security alliance on October 3, 2014 in Tokyo. During the meeting, both countries agreed to continue, strengthen the security alliance, and build a balanced and effective alliance in order to increase the responsibility and contribution of international peace and security. In addition, the United States also declared a commitment to give security protection for Japan to respond the dynamics of security in East Asia. The new agreements of the security alliance resulted coincide with the meeting of the Security Consultative Committee (SCC) 2013. SCC 2013 resulted agreements and new security cooperation that has never been done before. The extension of the security alliance is very beneficial for Japan. The new alliance showed consistency of United States to give security assistance to Japan to face the security dynamics in East Asia. In addition, the alliance will provide an opportunity for Japan to make more pro active contribution to international peace and security.*

**Keyword:** *security alliance, cooperation, security, East Asia, contribution of peace.*

**Pendahuluan**

Jepang merupakan negara yang menarik untuk dipelajari. Biasanya negara yang kaya (kuat secara ekonomi) mempunyai kekuatan militer yang kuat pula (*Rich Country Strong Army*). Namun berbeda dengan Jepang, dalam aspek ekonomi, Jepang bisa disebut sebagai negara kuat. Namun dalam aspek keamanan, Jepang masih bergantung pada dukungan keamanan Amerika Serikat. Jepang-Amerika Serikat terlibat dalam perjanjian aliansi keamanan sejak tahun 1951.

Aliansi keamanan Jepang-Amerika

Serikat merupakan aliansi yang terbentuk pasca kekalahan Jepang atas Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Jepang-Amerika Serikat menandatangani *Peace Treaty* sekaligus *Security Treaty (U.S.-Japan Security Treaty)* di San Fransisco pada tahun 1951. Pasca kekalahan Jepang atas Amerika Serikat, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat menjadi aspek penting dan kunci pemeliharaan keamanan Jepang. Melalui aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang bisa berlindung pada kekuatan besar militer Amerika Serikat.

Aliansi merupakan salah satu bentuk kerjasama keamanan dalam hubungan internasional. Menurut Julian R. Friedman, aliansi dalam hubungan internasional menunjukkan sebuah hubungan kerjasama diantara dua atau lebih negara yang mencakup kolaborasi dalam waktu yang telah ditentukan mengenai isu-isu yang saling menguntungkan serta penyatuan kemampuan negara yang tergabung untuk berpartisipasi dalam urusan internasional (Friedman, 1970:4-5). Aliansi berkaitan erat dengan bantuan militer dari negara lain yang bertujuan sebagai pertahanan dalam menghadapi musuh dari luar (*Ibid.*, 1970:79). Negara yang berusaha membangun aliansi mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kepentingan atau menghalangi ancaman yang dirasakan jika memobilisasikan kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka mengandalkan dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga menghadapi masalah luar negeri yang sama, atau secara bersama mereka mencapai tujuan itu. Suatu bangsa akan menjauhi aliansi jika berkeyakinan cukup kuat dengan bertahan sendirian tanpa bantuan negara lain dalam aliansi (K.J Holsti, 1988:117). Dalam hal ini aliansi sangat diperlukan oleh negara yang tidak dapat mencapai kepentingan nasionalnya tanpa bantuan negara lain.

Aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat merupakan aliansi yang telah berlangsung sejak tahun 1951 dan sampai saat ini masih berlangsung. Kedua negara belum menyatakan untuk mengakhiri aliansi. Dalam perjalanannya, aliansi mengalami beberapa pembaharuan-pembaharuan penting. Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Jepang-Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama baru. *Security Treaty (U.S.-Japan Security Treaty)* tahun 1951 direvisi dengan

terbentuknya *Japan-US Security Treaty 1960*, *Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America*. Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1978 juga direvisi dengan terbentuknya Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat tahun 1997. Sampai saat ini, *Japan-US Security Treaty 1960*, *Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America* serta Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat masih menjadi landasan dan pedoman bagi Jepang-Amerika Serikat untuk menjalankan aliansi keamanan.

Dalam perkembangannya, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat mulai memasuki tahapan aliansi yang lebih terkorodinasi dan melalui konsultasi yang lebih jauh. Pada awalnya aliansi fokus untuk pertahanan Jepang, kemudian berkembang dengan upaya untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan keamanan internasional, respon terhadap dinamika keamanan di Asia Timur, komitmen untuk membangun perdamaian, serta peningkatan kerjasama di berbagai bidang untuk memperkuat aliansi.

Di dalam negeri Jepang, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Hubungan aliansi Jepang-Amerika Serikat yang telah terjalin lebih dari 60 tahun memunculkan beragam respon dalam masyarakat Jepang. Terdapat tiga kelompok dalam menyikapi masa depan kekuatan militer Jepang. Kelompok pertama adalah kelompok *mainstream*, yang menginginkan Jepang memperoleh tanggung jawab politik dan militer lebih besar dalam kerjasama pertahanan bilateral. Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) harus meningkatkan kemampuan. Jepang dan Amerika Serikat harus membangun forum dialog

keamanan (*security dialogue*) serta meningkatkan saling-pemahaman (*mutual understanding*) dan efektivitas aliansi. Kelompok kedua adalah kelompok nasionalis yang berpandangan bahwa Jepang harus membangun kemampuan pertahanan sendiri dan melepaskan diri dari Amerika Serikat. Langkah awal yang diusulkan adalah merevisi konstitusi yang membatasi Jepang untuk mengembangkan kemampuan militer. Kelompok ketiga adalah Kelompok Pasifis yang menginginkan Jepang memberi kontribusi dalam kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengakhiri kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Kelompok Pasifis juga mendukung Jepang untuk mempertahankan konstitusi yang damai dan mengurangi kemampuan militer (Jepang dan Asia Timur Pasca-Koizumi”, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=6793&coid=3&caid=31&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6793&coid=3&caid=31&gid=3))

Walaupun terdapat perdebatan di dalam negeri, Jepang masih berkomitmen untuk menjalankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan dengan penegasan komitmen Jepang dan Amerika Serikat untuk terus memperpanjang aliansi keamanan pada tanggal 3 Oktober 2013. Perpanjangan aliansi tersebut merupakan bukti bahwa Jepang masih akan bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan keamanan Jepang serta dunia internasional.

### **Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat**

Pada tahun 2013, hubungan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat memasuki babak baru. Pada tanggal 3 Oktober 2013, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck

Hagel mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum terselenggaranya *Security Consultative Committee* (SCC) 2013 di Tokyo. Melalui kedua menteri tersebut, Jepang-Amerika Serikat melakukan konfirmasi mengenai pentingnya perpanjangan aliansi untuk memastikan keamanan Jepang dan stabilitas serta perdamaian di kawasan. Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk terus memberikan bantuan keamanan kepada Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Selain itu, kedua negara sepakat untuk bekerja sama membangun aliansi yang seimbang dan efektif untuk bersama-sama bertanggung jawab membangun dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional (“Japan–U.S. Defense Ministerial Meeting”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no46/leaders02.html>). Dengan mengambil kesempatan pada terselenggaranya SCC 2013 di Tokyo, kedua menteri juga sepakat untuk bekerjasama lebih jauh untuk memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat (*Ibid.*)

Diskusi lebih lanjut mengenai perpanjangan serta penguatan dan perluasan aliansi yang baru antara Jepang-Amerika Serikat dilakukan dalam pertemuan SCC 2013. SCC 2013 yang diselenggarakan di Tokyo dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Chuck Hagel, serta Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry. Mengingat lingkungan keamanan yang semakin parah di wilayah Asia-Timur, para menteri membahas aspek menengah hingga jangka panjang arah aliansi Jepang-Amerika Serikat dan penataan kembali tentara Amerika Serikat di Jepang, dan wacana revisi Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat tahun 1997.

SCC 2013 membahas aspek penting aliansi yang baru pasca komitmen Jepang-Amerika Serikat untuk terus memperpanjang aliansi. SCC 2013 juga menghasilkan pernyataan bersama yang tercantum dalam *Joint Statement of The Security Consultative Committee, Toward a More Robust and Greater Shared Responsibilities* (“Japan–U.S. Security Consultative Committee (“2+2”) Meeting”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no46/leaders.html>). Dalam *Joint Statement* tersebut, terdapat beberapa kesepakatan penting yang akan berpengaruh pada implementasi aliansi yang baru antara lain :

1. Penetapan visi strategis aliansi Jepang-Amerika Serikat yaitu komitmen untuk menjadi mitra penuh dalam aliansi yang lebih seimbang dan efektif. Kedua negara melakukan kerjasama dalam aliansi yang menggambarkan nilai-nilai bersama seperti demokrasi, mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Hal-hal tersebut didasarkan pada perluasan kerjasama keamanan dan pertahanan.
  2. Jepang menyatakan komitmennya untuk membuat kontribusi yang lebih proaktif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Selanjutnya Jepang akan melakukan koordinasi yang lebih erat untuk memperluas perannya dalam kerangka aliansi Jepang-Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat menyambut baik upaya Jepang tersebut.
  3. Menanggapi situasi keamanan di kawasan Asia Timur, Jepang-Amerika Serikat menyatakan bahwa aliansi harus tetap dalam posisi yang tepat untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan maupun tantangan terhadap norma-norma internasional. Diantaranya adalah program nuklir dan rudal Korea Utara serta terus mendorong Cina untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam stabilitas regional, mematuhi norma internasional dalam berperilaku, serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam melakukan modernisasi kemampuan militer.
- Perpanjangan aliansi Jepang-Amerika Serikat tahun 2013 berupaya untuk melaksanakan kerjasama keamanan dan pertahanan untuk meningkatkan dan memperkuat aliansi, antara lain (*Ibid.*) :
1. Kerjasama untuk meningkatkan pertahanan rudal balistik, *Ballistic Missile Defense* (BMD)
- Hal tersebut dilakukan dengan menunjuk pangkalan angkatan udara di Kyogamisaki sebagai tempat penyebaran radar TPY-2.
2. *Joint/Shared Use of Facilities*
- Penggunaan bersama fasilitas dan wilayah bagi Jepang-Amerika Serikat dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan aliansi serta meningkatkan postur JSDF di daerah termasuk di pulau-pulau barat daya Jepang.
3. Kerjasama Peralatan dan Teknologi Pertahanan
- Kedua negara menyambut baik hubungan baru melalui kolaborasi dalam kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan, seperti partisipasi industri Jepang dalam produksi pesawat F-35.
4. Pelatihan Bersama
- Kedua Menteri menyambut pelatihan bilateral efektif, meningkatkan latihan di luar wilayah Okinawa, termasuk partisipasi MV-22 Osprey di dalam menjalankan operasi di

wilayah Jepang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, kesiapan, mobilitas operasi JSDF dan Pasukan Amerika Serikat dan untuk meningkatkan *deterrence* aliansi Jepang-Amerika Serikat.

##### 5. *Official Development Assistance*

Jepang memberikan bantuan *Official Development Assistance* dalam kerangka pembangunan regional, misalnya penyediaan kapal patroli pesisir dan pelatihan keselamatan maritim bersama mitra regional, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.

##### 6. Keamanan maritim

Kerjasama lebih lanjut dalam keamanan maritim dan kontra pembajakan, memastikan keamanan *Sea Lines of Communication/SLOC* serta mempromosikan perdamaian.

Perpanjangan aliansi Jepang – AS yang baru juga disertai dengan modernisasi kemampuan yang lebih canggih. Amerika Serikat sebagai mitra aliansi Jepang berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan yang lebih canggih ke Jepang sebagai bentuk kontribusinya untuk memelihara keamanan Jepang. Amerika Serikat memperkenalkan dua skuadron pesawat MV-22 sebagai pengganti helikopter CH-46, penyebaran pesawat tempur F-35 pada 2017, serta penyebaran pesawat tanpa awak *Global Hawk* yang akan dimulai pada tahun 2014. Selain itu, untuk pertama kalinya Amerika Serikat akan mengirimkan pesawat pengintai dan pesawat patroli maritim Navy P-8 ke Jepang pada akhir 2013 (*Ibid.*). Jepang-Amerika Serikat juga sepakat untuk menempatkan radar penangkal misil yang kedua di Jepang (“AS-Jepang Tingkatkan Kerjasama Pemantauan Militer”, <http://www.voaindonesia.com/content/as-jepang-tingkatkan-pemantauan-militer/1762597.html>).

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, kesiapan, mobilitas operasi JSDF dan Pasukan Amerika Serikat dan untuk meningkatkan *deterrence* aliansi Jepang-Amerika Serikat.

Pada dasarnya, kesepakatan-kesepakatan dalam perpanjangan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat memberikan keuntungan bagi Jepang. Oleh karena itu, Jepang memperpanjang aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat.

#### **Pemeliharaan Keamanan Jepang dalam Menghadapi Dinamika Keamanan di Kawasan Asia Timur**

Keamanan nasional Jepang dipengaruhi oleh stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Letak negara-negara di kawasan Asia Timur yang berdekatan dan mayoritas memiliki batas maritim membuat situasi keamanan di sekitar Jepang dan kawasan Asia Timur memiliki potensi yang dapat memicu konflik bilateral.

*White Paper* Jepang tahun 2013 menggambarkan pandangan Jepang mengenai kondisi keamanan di wilayah Asia Timur. Jepang menggambarkan situasi keamanan di wilayah Asia Timur yang mencakup berbagai masalah dan faktor destabilisasi (“Security Environment Surrounding Japan”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/02\\_Digest\\_part1.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/02_Digest_part1.pdf)). Dalam hal ini destabilisasi adalah kondisi keamanan yang tidak stabil dan sulit untuk diprediksi. Situasi yang sulit diprediksi tersebut adalah munculnya ancaman dari negara tetangga di kawasan Asia Timur sehingga menimbulkan kerawanan konflik. Jepang menggambarkan secara nyata segala bentuk ancaman yang akan mempengaruhi lingkungan keamanan Jepang. Ancaman tersebut berasal dari negara Korea Utara dan Cina.

Jepang memiliki pandangan khusus mengenai Korea Utara. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan bahwa Korea

Utara adalah salah satu negara yang menjadi perhatian utama dalam aspek keamanan (“Insight: Japan unease over U.S. alliance adds fuel to Abe’s security shift, <http://www.reuters.com/article/2014/02/04/us-japan-usa-alliance-insight-idUSBREA131L120140204>). Dalam *White Paper* Jepang tahun 2013 Jepang menganggap Korea Utara bermaksud untuk terus meningkatkan kekuatannya. Menurut Jepang, Korea Utara akan mempertahankan dan memperkuat kemampuan militernya dan terus melakukan provokasi militer. Provokasi militer tersebut telah diwujudkan dengan uji coba nuklir dari periode 2006 sampai awal 2014 (*Ibid.*).

Salah satu provokasi militer yang dilakukan oleh Korea Utara adalah peluncuran rudal Korea Utara yang disebut “satelit”, pada bulan Desember 2012. Menurut pandangan Jepang, aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara telah meningkatkan teknologi untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan akurasi rudal balistik. Jepang menilai bahwa pengembangan rudal balistik Korea Utara telah memasuki babak baru dan berkembang menjadi masalah yang lebih nyata bagi dunia internasional. Provokasi militer yang telah dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman serius bagi keamanan Jepang dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di Asia Timur (*Ibid.*).

Cina merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang cenderung memiliki ketegangan hubungan dengan Jepang. Hubungan Jepang-Cina semakin memanas dengan adanya aktivitas serta pelanggaran maritim Cina di wilayah perairan Jepang. Cina tercatat melakukan aktivitas perairan melewati wilayah Jepang. Namun Cina tidak memberikan klarifikasi dengan jelas mengenai aktivitas yang dilakukannya tersebut. Menurut *White Paper* Jepang tahun 2013, pada Januari 2013, sebuah

kapal angkatan laut Cina mengarahkan radar api kontrol ke kapal *Japan Militer Self Defense Force/JMSDF*. Sehubungan dengan aktivitas yang membahayakan tersebut, pemerintah Cina memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta, bahkan menyangkal penggunaan radar itu sendiri (*Ibid.*).

Aktivitas maritim Cina juga terjadi di wilayah sengketa. Jepang-Cina terlibat sengketa wilayah Kepulauan Senkaku pasca Perang Dunia II dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam perkembangannya, Cina menunjukkan peningkatan aktivitas maritim di wilayah sengketa. Pada bulan April 2013, delapan kapal milik Pemerintah Cina masuk ke wilayah Jepang (“Jepang Tak Takut Usir China di Wilayah Sengketa”, <http://international.okezone.com/read/2013/04/23/413/796131/jepang-tak-takut-usir-china-di-wilayah-sengketa>). Pada bulan Mei, aparat penjaga pantai Jepang melaporkan bahwa tiga kapal milik pemerintah Cina memasuki wilayah sengketa (“Lagi, Kapal China Masuki Wilayah Sengketa”, <http://international.okezone.com/read/2013/05/13/413/806113/lagi-kapal-china-masuki-wilayah-sengketa>). Pada bulan Juni 2013, tiga kapal Cina kembali berlayar di wilayah pulau yang bersengketa (“3 Kapal China berlayar di perairan kepulauan yang disengketakan”, <http://international.sindonews.com/read/750049/40/3-kapal-china-berlayar-di-perairan-kepulauan-yang-disengketakan>). Pada Juli 2013, empat kapal Penjaga Pantai Cina mendekati wilayah yang disengketakan. Sebelumnya sebuah pesawat militer Cina melintasi wilayah udara Jepang. Jepang pun merespon dengan segera mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur (“China dan Jepang memperuncing konflik Kepulauan Senkaku”, <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/08/23/senkaku-conflict->

continues).

Tindakan Cina yang sering melewati perairan Jepang dan melakukan pelanggaran maritim di wilayah sengketa tanpa keterangan yang jelas merupakan salah satu bentuk provokasi yang akan menimbulkan potensi konflik yang baru. Tindakan tersebut juga dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Selain memperhatikan aktivitas maritim Cina di kawasan perairan Jepang, Jepang juga memperhatikan peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan Cina. Anggaran pertahanan Cina terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatan anggaran pertahanan Cina mencapai empat kali lipat dalam ukuran selama sepuluh tahun terakhir, dan telah berkembang lebih dari 33 kali lipat selama 25 tahun terakhir (“China”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/wpaper/pdf/2013/11\\_Part1\\_Chapter1\\_Sec3.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/wpaper/pdf/2013/11_Part1_Chapter1_Sec3.pdf)).

Dalam *White Paper* Jepang tahun 2013, Jepang memandang Cina telah secara luas dan cepat melakukan modernisasi kekuatan militer. Saat ini Cina telah berkembang pesat dan mengintensifkan kegiatannya di wilayah darat, laut, dan udara. Namun, modernisasi kekuatan yang dilakukan oleh Cina diiringi dengan kurangnya transparansi informasi mengenai aspek militernya. Menurut Jepang, Cina belum memberikan informasi spesifik tentang kepemilikan senjata, organisasi dan lokasi unit utama, catatan operasi utama militer dan latihan, serta rincian dari anggaran pertahanan nasional (*Ibid.*).

Segala bentuk ancaman di kawasan Asia Timur merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan wilayah Jepang dan juga kawasan Asia Timur. Dalam hal ini kehadiran Amerika Serikat akan memberikan manfaat bagi Jepang.

Dalam *Treaty Of Mutual Cooperation*

*And Security Between Japan And The United States Of America* tahun 1960, Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan keamanan kepada Jepang. Hal tersebut terlihat dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan. The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon” (“Japan-U.S. Security Treaty”, <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>).

Pasal 6 di atas menggambarkan komitmen Amerika Serikat terhadap Jepang. Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan Jepang serta kawasan di sekitar Jepang, Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan. Sementara itu, Jepang menyediakan fasilitas dan sarana wilayah untuk pasukan militer Amerika Serikat.

Keberadaan Amerika Serikat dibelakang Jepang sebagai mitra aliansi yang melindungi dan memelihara keamanan Jepang menjadi aspek penting dalam pertahanan Jepang. Berdasarkan konsep dasar kebijakan pertahanan Jepang, pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat merupakan salah satu pilar dari pertahanan nasional Jepang. Aliansi Jepang-Amerika Serikat sangat diperlukan untuk mempertahankan tidak hanya perdamaian dan keamanan Jepang, namun juga memelihara keamanan kawasan Asia Timur. Selain itu, kehadiran pasukan militer Amerika

Serikat di Jepang tidak hanya memberikan kontribusi untuk pertahanan Jepang, tetapi juga berfungsi sebagai *deterrence* untuk melawan dan merespon terhadap segala kemungkinan ancaman di kawasan (“The Japan–U.S. Security Arrangements”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/30\\_Part2Chapter3Sec1.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/30_Part2Chapter3Sec1.pdf)).

Makna keberadaan Amerika Serikat di Jepang digambarkan dalam pasal 5 perjanjian keamanan Jepang-Amerika Serikat. Pasal 5 menyatakan bahwa:

“Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain *international peace and security*.” (“Japan-U.S. Security Treaty”, <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>)

Pasal 5 perjanjian keamanan Jepang-Amerika Serikat di atas menyatakan bahwa kedua negara menganggap serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di wilayah Jepang akan berbahaya bagi perdamaian dan keamanan Jepang dan akan memunculkan bahaya bersama. Dengan menganggap setiap serangan yang muncul ke wilayah Jepang sebagai sebuah bentuk ancaman dan bahaya bersama, maka Jepang-Amerika Serikat akan bekerjasama dan mengambil tindakan bilateral dalam hal serangan bersenjata melawan Jepang. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk membela Jepang. Hal tersebut diwujudkan salah satunya dengan

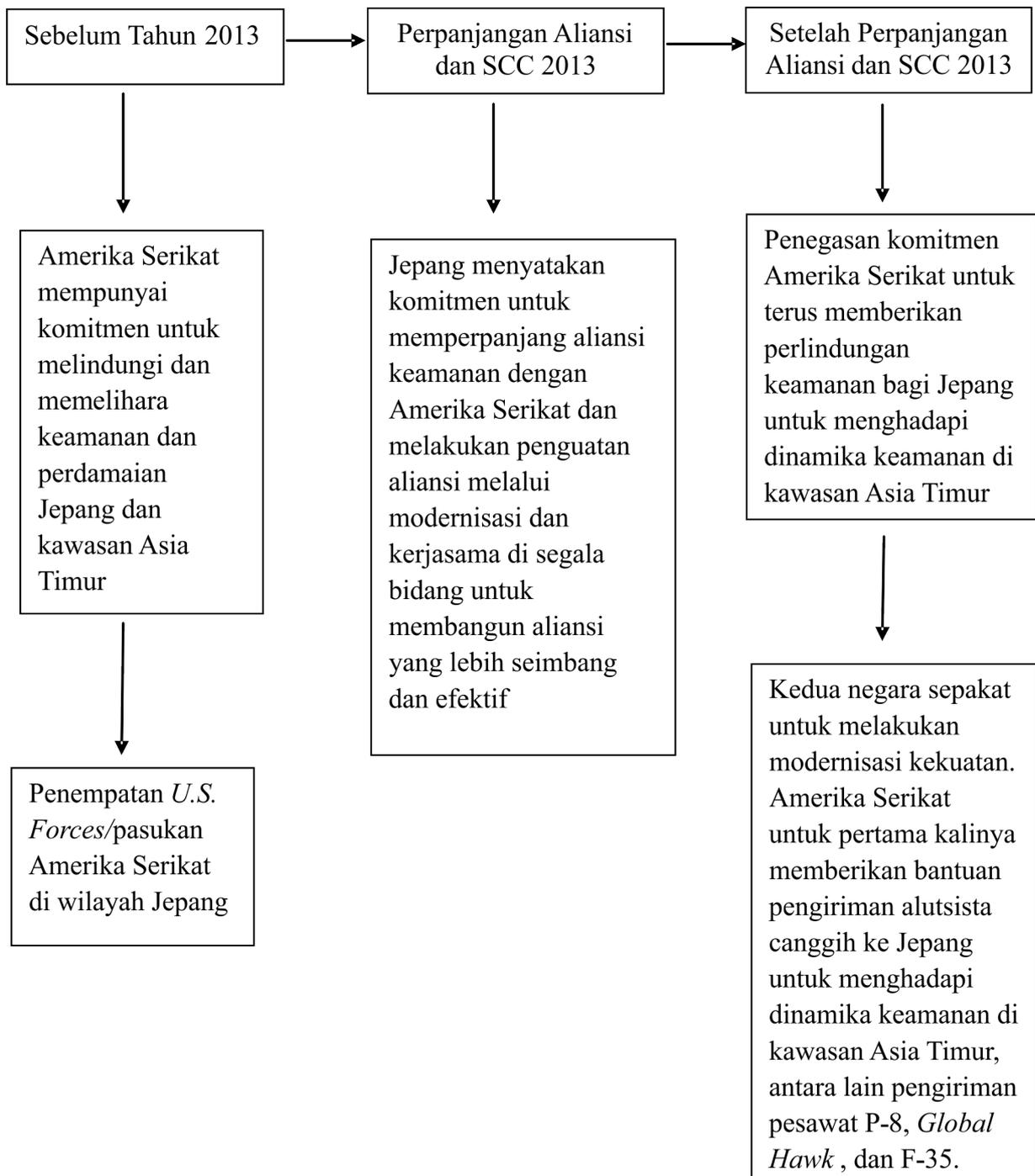
penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang. Dengan demikian, jika suatu negara berencana untuk menyerang Jepang, negara tersebut akan menghadapi pasukan *Japan Self Defense Force/ JSDF* yang didukung oleh kekuatan militer pasukan Amerika Serikat (*Ibid.*).

Jepang memiliki JSDF sebanyak 140.000 pasukan. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pasukan militer Cina yaitu sebanyak 1.600.000 pasukan darat dan 10.000 angkatan laut dan Korea Utara sebanyak 1.000.000 pasukan (“Trends in the International Community”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/07\\_Part1\\_Chapter0\\_Sec2](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/07_Part1_Chapter0_Sec2)). Apabila Jepang mengalami serangan dari kedua negara tersebut maka kecil kemungkinannya Jepang dapat bertahan, karena dari segi kuantitas pasukan, Jepang kalah dibandingkan keduanya. Meskipun pasukan Jepang sedikit kuantitasnya, namun Jepang didukung oleh pasukan Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Jepang. Jumlah pasukan Amerika Serikat di Jepang adalah 21.000 (*Ibid.*). Dukungan pasukan Amerika Serikat tersebut membawa kekuatan militer yang cukup besar. Dengan keberadaan pasukan Amerika Serikat tersebut dapat memberikan rasa aman kepada Jepang dan mencegah munculnya serangan dari negara lain di kawasan.

Dalam perpanjangan aliansi yang baru pada tahun 2013, kedua negara sangat memperhatikan kondisi keamanan di kawasan Asia Timur. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan memberikan keuntungan karena Amerika Serikat terus menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan keamanan kepada Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur (lihat Skema 1).

**Skema 1**

Bantuan Keamanan Amerika Serikat ke Jepang Sebelum dan Setelah Perpanjangan Aliansi Tahun 2013



Sumber: Diolah oleh penulis

Sejak terlibat aliansi keamanan dengan Jepang, Amerika Serikat telah menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Jepang. Hal tersebut dilakukan dengan penempatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Jepang.

Perpanjangan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat pada tahun 2013 merupakan pembaharuan signifikan yang mewarnai hubungan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat. Kesepakatan-kesepakatan dalam perpanjangan aliansi yang dilanjutkan dalam *Security Consultative Committee* (SCC) tahun 2013 menghasilkan pembaharuan yang terdiri dari penegasan komitmen Amerika Serikat untuk terus memberikan bantuan kepada Jepang serta modernisasi kekuatan yang akan mempengaruhi upaya kedua negara menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Hal tersebut direalisasikan melalui pengiriman pesawat P-8 dan *Global Hawk* untuk merespon kondisi keamanan di kawasan yang semakin tumbuh tidak stabil. Dengan modernisasi kekuatan yang dilakukan dalam perpanjangan aliansi yang baru, maka diharapkan Amerika Serikat dapat efektif dalam membantu Jepang menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, perpanjangan aliansi sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang konstruktif antara Jepang-Amerika Serikat dalam menghadapi segala ancaman di kawasan Asia Timur.

Dalam konferensi pers pasca SCC 2013, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, menyatakan bahwa lingkungan keamanan di sekitar Jepang telah tumbuh semakin parah, salah satunya adalah peningkatan aktivitas program nuklir dan rudal dari Korea Utara, sengketa wilayah Jepang-Cina, dan juga modernisasi militer Cina. Oleh karena itu, Jepang dan Amerika Serikat harus meningkatkan aliansi

dan memainkan tanggung jawab yang lebih kuat dan lebih besar untuk kawasan dan masyarakat internasional. Selain itu, Jepang-Amerika Serikat akan melakukan kerjasama dan diskusi yang lebih mendalam untuk memelihara pertahanan dan keamanan Jepang serta memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Selain itu, Fumio Kishida juga menyatakan bahwa selama ini aliansi Jepang-Amerika Serikat telah menjadi landasan perdamaian dan stabilitas di kawasan (“Remarks With Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese Foreign Minister Fumio Kishida and Japanese Defense Minister Itsunori Onodera”, <http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/10/215073.htm>).

Sementara itu, Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe merespon positif atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Menurut Abe, pernyataan bersama menunjukkan kepada dunia tentang hubungan yang kuat antara Jepang-Amerika Serikat. Abe juga mengatakan bahwa hal tersebut sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan (“Abe Sambut Positif Aliansi AS-Jepang”, <http://m.menit.tv/welcome/read/2013/10/04/20598/14/14/Abe-Sambut-Positif-Aliansi-AS-Jepang>). Sedangkan menurut penasehat keamanan Abe, Yosuke Isozaki, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat merupakan aliansi yang paling penting, dan komitmen tersebut tidak akan berubah (“Insight: Japan unease over U.S. alliance adds fuel to Abe’s security shift”, <http://www.reuters.com/article/2014/02/04/us-japan-usa-alliance-insight-idUSBREA131L120140204>).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Amerika Serikat memiliki makna yang sangat penting bagi Jepang untuk memelihara keamanannya dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Konsistensi Amerika Serikat serta bantuan keamanan nyata

Amerika Serikat bagi Jepang dalam kerangka perpanjangan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat akan sangat menguntungkan bagi Jepang.

### **Partisipasi Aktif Jepang Dalam Upaya Perdamaian dan Keamanan Internasional**

Jepang merupakan negara cinta damai. Kebijakan Jepang menggambarkan mengenai prinsip dan komitmen Jepang dalam perdamaian. Dalam Konstitusi 1947 menggambarkan komitmen Jepang yang menginginkan perdamaian untuk semua dan bersama-sama dengan masyarakat internasional mewujudkan perdamaian dan keamanan. Komitmen Jepang tersebut secara khusus tercantum dalam Pasal 9 Konstitusi 1947 yang menyatakan bahwa Jepang yang baru adalah Jepang yang bertekad untuk menciptakan perdamaian internasional, meninggalkan ancaman dan serangan terhadap negara lain, serta meninggalkan cara kekerasan dan perang untuk menyelesaikan sengketa internasional ( "Fundamental Concepts of National Defense, [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/dp01.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html)).

Dalam kerangka aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat, kedua negara juga memiliki visi yang sama untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 *Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America*, yaitu:

*"The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political*

*independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively."* ("Japan-U.S. Security Treaty", <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>)

Aspek penting yang dijelaskan dalam Pasal 1 di atas adalah bahwa Jepang-Amerika Serikat menjalankan aliansi harus didasarkan pada Piagam PBB. Selain itu, penyelesaian sengketa internasional yang mungkin terjadi harus dilakukan secara damai, sehingga perdamaian, keamanan, dan ketertiban internasional tidak terancam. Jepang-Amerika Serikat akan berusaha keras dengan negara lain untuk mendukung PBB agar misinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional akan lebih efektif. Pada intinya, setiap kerjasama yang dilakukan dalam kerangka aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat harus didasarkan pada Piagam PBB dan sejalan dengan tujuan PBB yaitu memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Kesepakatan-kesepakatan dalam perpanjangan aliansi keamanan tahun 2013 sejalan dengan kebijakan dan prinsip Jepang untuk berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan internasional.

1. Perpanjangan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat tahun 2013 menghasilkan kesepakatan yaitu penetapan visi strategis Jepang-Amerika Serikat untuk membangun aliansi yang seimbang dan efektif. Dalam hal ini aliansi diharapkan untuk berkembang dan membangun sebuah kemitraan penuh yang mampu bertanggung jawab dan berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan internasional. Dengan perpanjangan aliansi

keamanan yang baru, melalui visi strategis yang baru, maka diharapkan Jepang mampu berperan lebih aktif dalam perdamaian dan keamanan internasional.

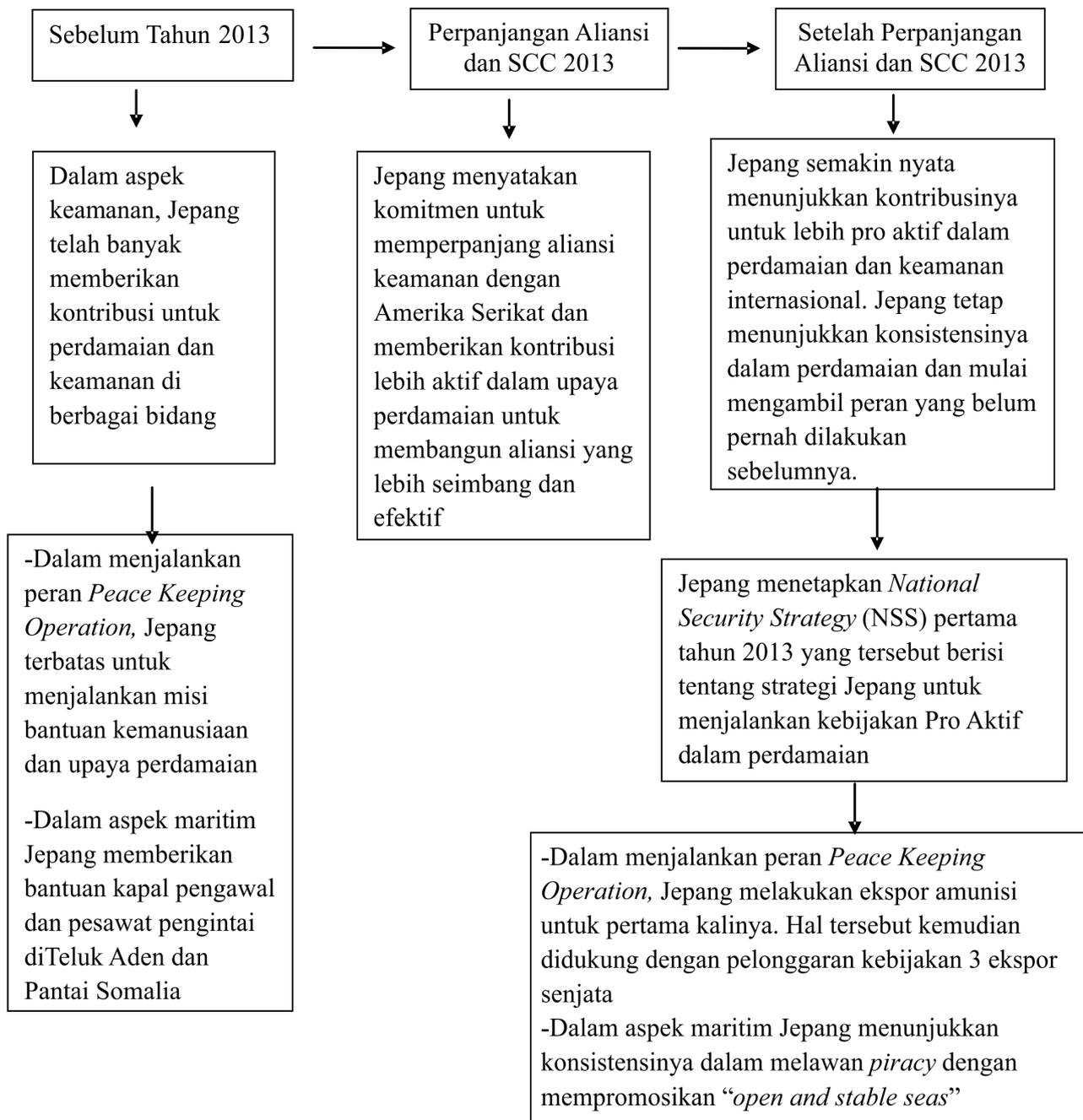
2. Jepang menyatakan komitmennya untuk membuat kontribusi yang lebih proaktif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Selanjutnya Jepang akan melakukan koordinasi yang lebih erat untuk memperluas perannya dalam kerangka aliansi Jepang-Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat menyambut baik upaya Jepang tersebut. Dukungan Amerika Serikat dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi Jepang untuk berperan dalam perdamaian dan keamanan internasional tanpa menimbulkan kecurigaan negara lain.

Dalam konferensi pers setelah SCC 2013, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry menyatakan bahwa perpanjangan dan penguatan aliansi dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan aliansi yang lebih seimbang dan efektif, sehingga Jepang-Amerika Serikat menjadi mitra penuh yang bekerja sama dengan satu sama lain, dan dengan mitra regional lainnya, untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan (“US, Japan aim at ‘balanced’ security alliance”, [http://www.spacedaily.com/reports/US\\_Japan\\_aim\\_at\\_balanced\\_security\\_alliance\\_999.html](http://www.spacedaily.com/reports/US_Japan_aim_at_balanced_security_alliance_999.html)). Salah satu hal yang ingin dicapai dalam aliansi yang baru adalah Jepang menjadi kontributor yang lebih pro aktif dalam aliansi sehingga tercipta aliansi yang lebih kuat dengan tanggung jawab bersama yang lebih besar (“Japan-US Alliance Adapts to the Needs of the 21st Century”, <http://www.asiamattersforamerica.org/japan/japan-us-alliance-adapts-to-the-needs-of-the-21st-century>).

Dalam konferensi pers pasca SCC 2013, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida menekankan bahwa pemerintahan Shinzo Abe mempunyai kebijakan keamanan berdasarkan kontribusi produktif untuk perdamaian dan berhubungan dengan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat (“Remarks With Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese Foreign Minister Fumio Kishida and Japanese Defense Minister Itsunori Onodera”) Shinzo Abe juga mengatakan keinginannya agar Jepang memainkan peran yang lebih aktif (“U.S., Japan Agree to Expand Security, Defense Cooperation”, <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120902>).

Pernyataan kedua pihak di atas menandakan bahwa kedua negara mempunyai misi yang sama untuk membuat Jepang lebih pro aktif dalam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, dengan perpanjangan aliansi yang dilakukan akan memberikan peran yang lebih luas dan efektif bagi Jepang untuk berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan internasional. Dengan komitmen baru Jepang untuk pro aktif dalam perdamaian dan keamanan internasional dan diikuti dengan dukungan Amerika Serikat maka akan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi Jepang dalam perdamaian dan keamanan internasional. Pada masa awal pasca perpanjangan aliansi, Jepang telah mulai menunjukkan peningkatan partisipasinya dalam perdamaian (lihat Skema 2).

**Skema 2**  
**Peran Perdamaian Jepang Sebelum dan Sesudah**  
**Perpanjangan Aliansi Tahun 2013**



Sumber: Diolah oleh penulis

Sebagai negara cinta damai, Jepang berupaya untuk memberikan kontribusinya dalam perdamaian dan keamanan internasional. Komitmen Jepang untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan

tersebut diimplementasikan melalui berbagai cara, beberapa diantaranya adalah melalui kontribusi dalam PBB, *Peace Keeping Operations* (PKO), dukungan terhadap perlucutan senjata dan non proliferasi nuklir.

Jepang tercatat sebagai negara terbesar kedua sebagai negara penyumbang iuran PBB tahun 2011 dengan presentase 12,5 %. Dalam pengiriman PKO, Jepang menjadi negara pengirim pasukan PKO terbanyak ke-12. Selain itu Jepang juga berkontribusi dalam dukungan finansial untuk pelaksanaan PKO. Jepang menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang terbesar dengan presentase 10.833% dari total anggaran PKO (“Japan’s contribution to United Nations peacekeeping operations”, <http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pdfs/contribution.pdf>). Dalam dukungannya terhadap perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir, Jepang mempromosikan perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi ke dunia internasional. Pada bulan September 2009, Perdana Menteri Yukio Hatoyama menghadiri KTT Dewan Keamanan PBB Untuk Non-Proliferasi Nuklir dan Perlucutan Senjata Nuklir. Dalam kesempatan tersebut, Jepang berjuang untuk memimpin upaya internasional untuk perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi senjata nuklir, penggunaan energi nuklir secara damai dan keamanan nuklir (yaitu pencegahan nuklir untuk terorisme). Jepang juga telah mengajukan resolusi tentang perlucutan senjata nuklir kepada Majelis Umum PBB, setiap tahunnya sejak 1994, dengan fokus pada mengambil langkah konkret terhadap penghapusan senjata nuklir (*Ibid.*).

Dalam perkembangannya Jepang terus memberikan kontribusi dan peran perdamaian bagi dunia internasional. Perpanjangan aliansi tahun 2013 menunjukkan keinginan Jepang untuk berkontribusi lebih aktif dalam perdamaian. Pasca perpanjangan aliansi, Jepang menunjukkan peran perdamaian baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya.

Jepang menunjukkan komitmen baru dalam kontribusi perdamaian dengan menetapkan *National Security Strategy*

(NSS) 2013. NSS 2013 menetapkan prinsip dasar keamanan nasional untuk berkontribusi lebih proaktif menciptakan perdamaian dan keamanan bagi Jepang dan kawasan, yang didasarkan pada prinsip kerjasama internasional. Jepang akan mempraktekkan prinsip tersebut dalam kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain (“Statement by Minister for Foreign Affairs of Japan on Adoption of the “National Security Strategy (NSS)”, [http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e\\_000141.html](http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000141.html)).

Dalam aspek maritim, Jepang telah memulai kontribusinya dengan memberikan bantuan kapal pengawal dan pesawat pengintai di Teluk Aden dan Pantai Somalia sejak tahun 2009. Pasca perpanjangan aliansi, Jepang tetap konsisten untuk memberikan kontribusi perdamaian untuk menciptakan keamanan maritim dalam melawan *piracy* di Teluk Aden dan Pantai Somalia. Namun Jepang sebagai negara maritim juga mulai mengembangkan dan mempromosikan “*Open and Stable Seas*”. Tujuan tersebut akan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti aturan hukum yang berlaku, jaminan kebebasan dan keamanan navigasi, dan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Jepang juga akan berupaya untuk melaksanakan operasi anti pembajakan untuk memastikan transportasi maritim yang aman dengan meningkatkan kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara lain (“National Security Strategy”, [http://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/documents/2013/icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NSS.pdf](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NSS.pdf)).

Pasca perpanjangan aliansi yang baru, Jepang mulai memperlihatkan peran berbeda dalam pengiriman PKO. Di Republik Sudan Selatan, situasi keamanan semakin memburuk sejak pertengahan Desember 2013 akibat serangan

bersenjata oleh pasukan anti pemerintah. Dalam situasi tersebut, Pemerintah Jepang menerima permintaan dari Pemerintah Republik Korea (ROK) dan PBB untuk menyediakan amunisi, yang akan digunakan untuk melindungi personel ROK dan ditempatkan di Bor, Jonglei Negara, serta untuk melindungi para pengungsi dan pihak lain. Pemerintah Jepang pun memutuskan untuk memberikan 10.000 butir amunisi untuk PBB berdasarkan permintaan dari Pemerintah ROK dan PBB (“Contribution in Kind to the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)”, [http://www.mofa.go.jp/foreign/pc/page18e\\_000051.html](http://www.mofa.go.jp/foreign/pc/page18e_000051.html)).

Kontribusi Jepang tersebut dilaksanakan karena kondisi yang mendesak dan diperlukan tindakan cepat untuk melindungi pasukan perdamaian dan warga sipil. Oleh karena itu, kebijakan Tiga Prinsip Ekspor Senjata (larangan untuk mengeksport ke negara komunis, negara yang terkena sanksi embargo dari PBB, dan negara konflik) tidak berlaku untuk kasus ini karena penyediaan amunisi dilaksanakan dalam kerangka Kerjasama Operasi Penjaga Perdamaian PBB (*Ibid.*). Pemberian amunisi tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Hal tersebut merupakan hal baru yang dilakukan oleh Jepang, yaitu terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Tiga Prinsip Ekspor Senjata.

### Kesimpulan

Aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat telah memasuki babak baru. Kedua negara melakukan pembaharuan baru, menghasilkan kesepakatan baru, komitmen baru dan kerja sama baru yang akan menguatkan aliansi keamanan. Aliansi yang baru semakin menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk melindungi Jepang dan memberikan bantuan keamanan bagi Jepang dalam menghadapi

dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Aliansi yang baru juga membuka peluang lebih besar kepada Jepang untuk bersama-sama dengan Amerika Serikat membangun perdamaian dan keamanan internasional.

Dinamika keamanan di kawasan telah mempengaruhi hubungan aliansi baru antara Jepang-Amerika Serikat. Kondisi keamanan di kawasan yang disertai tindakan provokasi nuklir dari Korea Utara dan modernisasi militer dari Cina menuntut Jepang untuk bekerjasama lebih jauh dengan Amerika Serikat. Jepang seperti tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat dalam aspek keamanan. Kekuatan *Japan Self Defense Force* / JSDF yang didukung dengan kekuatan besar dari pasukan Amerika Serikat di Jepang dapat dijadikan sebagai *deterrence* dan menghadapi provokasi-provokasi militer yang dilakukan Cina dan Korea Utara di kawasan. Selain itu, dalam aliansi yang baru, Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan dengan melakukan modernisasi kekuatan dan peralatan canggih ke Jepang. Bantuan keamanan tersebut menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk terus membantu Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan baru di kawasan Asia Timur. Dengan tetap berada dalam kerangka aliansi dengan Amerika Serikat, maka keamanan Jepang akan tetap didukung oleh pasukan Amerika Serikat yang didukung peralatan canggih yang tersebar di wilayah Jepang.

Aliansi yang baru memberikan peluang bagi Jepang untuk lebih pro aktif dan berperan dalam perdamaian. Seperti negara lainnya, Jepang diharapkan mampu untuk berperan sebagai masyarakat internasional yang memberikan kontribusi bagi perdamaian. Dukungan dan jaminan Amerika Serikat juga memungkinkan Jepang untuk mulai berbuat lebih pro aktif dalam

menciptakan perdamaian dan keamanan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Jepang sangat diuntungkan dengan keberadaan Amerika Serikat sebagai mitra aliansi Jepang. Amerika Serikat terus memberikan dukungan kepada Jepang untuk terus berkembang dan memberikan bantuan serta komitmen untuk melindungi Jepang. Oleh karena itu, penting bagi Jepang untuk terus mempertahankan dan memperpanjang aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Friedman, Julian R., at al, 1970, *Alliance in International Politics*, Boston, Allyn and Bacon Inc.

Holsti, K.J., 1988, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, edisi keempat, terj. M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga.

### B. Internet

“3 Kapal China berlayar di perairan kepulauan yang disengketakan”, <http://international.sindonews.com/read/750049/40/3-kapal-china-berlayar-di-perairan-kepulauan-yang-disengketakan>, diakses tanggal 13 November 2013.

“Abe Sambut Positif Aliansi AS-Jepang”, <http://m.menit.tv/welcome/read/2013/10/04/20598/14/14/Abe-Sambut-Positif-Aliansi-AS-Jepang>, diakses tanggal 10 Juli 2014.

“AS-Jepang Tingkatkan Kerjasama Pemantauan Militer”, <http://www.voaindonesia.com/content/as-jepang-tingkatkan-pemantauan-militer/1762597.html>, diakses tanggal 4 Juni 2014.

“Contribution in Kind to the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)”, [http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page18e\\_000051.html](http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page18e_000051.html), diakses tanggal 4 Juni 2014.

“China”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/11\\_Part1\\_Chapter1\\_Sec3.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/11_Part1_Chapter1_Sec3.pdf), diakses tanggal 1 Februari 2014.

“China dan Jepang memperuncing konflik Kepulauan Senkaku”, <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/08/23/senkaku-conflict-continues>, diakses tanggal 13 November 2013..

“Insight: Japan unease over U.S. alliance adds fuel to Abe’s security shift”, <http://www.reuters.com/article/2014/02/04/us-japan-usa-alliance-insight-idUSBREA131L120140204>, diakses tanggal 14 Maret 2014.

“Fundamental Concepts of National Defense”, [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/dp01.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html), diakses tanggal 28 Januari 2014.

“Japan-US Alliance Adapts to the Needs of the 21st Century”, <http://www.asiamattersforamerica.org/japan/japan-us-alliance-adapts-to-the-needs-of-the-21st-century>, diakses tanggal 26 Juni 2014.

“Japan–U.S. Defense Ministerial Meeting”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no46/leaders02.html>, diakses tanggal 10 Desember 2013.

“Japan–U.S. Security Consultative Committee (“2+2”) Meeting”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no46/leaders.html>, diakses tanggal 10 Desember 2013.

“Japan-U.S. Security Treaty”, <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>, diakses tanggal 21 November 2013.

“Japan’s contribution to United Nations peace-keeping operations”, <http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pdfs/contribution.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 2014.

“Jepang dan Asia Timur Pasca-Koizumi”, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=6793&coid=3&caid=31&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6793&coid=3&caid=31&gid=3), diakses tanggal 9 Maret 2014.

- “Jepang Tak Takut Usir China di Wilayah Sengketa”, <http://international.okezone.com/read/2013/04/23/413/796131/jepang-tak-takut-usir-china-di-wilayah-sengketa>, diakses tanggal 13 November 2013.
- “Joint Statement Of The Security Consultative Committee”: Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities”, [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/us/Joint-Statement2013.pdf](http://www.mod.go.jp/e/d_act/us/Joint-Statement2013.pdf), diakses tanggal 1 Februari 2014.
- “Lagi, Kapal China Masuki Wilayah Sengketa”, <http://international.okezone.com/read/2013/05/13/413/806013/lagi-kapal-china-masuki-wilayah-sengketa>, diakses tanggal 13 November 2013.
- “National Security Strategy”, [http://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/documents/2013/\\_ics-Files/afieldfile/2013/12/17/NSS.pdf](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/_ics-Files/afieldfile/2013/12/17/NSS.pdf), diakses tanggal 4 Juni 2014.
- “Remarks With Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese Foreign Minister Fumio Kishida and Japanese Defense Minister Itsunori Onodera”, <http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/10/215073.htm>, diakses tanggal 21 Juli 2014.
- “Security Environment Surrounding Japan”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/02\\_Digest\\_part1.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/02_Digest_part1.pdf), diakses tanggal 1 Februari 2014.
- “Statement by Minister for Foreign Affairs of Japan on Adoption of the “National Security Strategy (NSS)””, [http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e\\_000141.html](http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000141.html), diakses tanggal 30 Juni 2014.
- “The Japan–U.S. Security Arrangements”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/30\\_Part2\\_Chapter3\\_Sec1.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/30_Part2_Chapter3_Sec1.pdf), diakses tanggal 1 Februari 2014.
- “Trends in the International Community”, [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2013/07\\_Part1\\_Chapter0\\_Sec2.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/07_Part1_Chapter0_Sec2.pdf), diakses tanggal 1 Februari 2014.
- “U.S., Japan Agree to Expand Security, Defense Cooperation”, <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120902>, diakses tanggal 26 Juni 2014.
- “US, Japan aim at ‘balanced’ security alliance”, [http://www.spacedaily.com/reports/US\\_Japan\\_aim\\_at\\_balanced\\_security\\_alliance\\_999.html](http://www.spacedaily.com/reports/US_Japan_aim_at_balanced_security_alliance_999.html), diakses tanggal 26 Juni 2014.